

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang Masalah**

Suatu diskursus pemberdayaan selalu akan dihadapkan pada fenomena ketidakberdayaan sebagai titik tolak dari aktivitas pemberdayaan. Ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat telah menjadi bahan diskusi dan wacana akademis dalam beberapa dekade terakhir ini. Di Indonesia, diskursus pemberdayaan semakin menguat berkaitan dengan penguatan demokratisasi dan pemulihan (*recovery*) krisis ekonomi. Kieffer dalam Edi Suharto (1998:211) mendeskripsikan secara konkrit tentang kelompok mana saja yang mengalami ketidakberdayaan yaitu “kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat seperti masyarakat kelas ekonomi rendah, kelompok miskin, usaha kecil, pedagang kaki lima, etnis minoritas, perempuan, buruh kerah biru, petani kecil, umumnya adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan”.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh keluarga saat ini adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan serta ketidakmenentuan jenis pekerjaan yang ditekuni dan penghasilannya. Untuk itu tentunya mereka membutuhkan fasilitas untuk dapat mengakses sistem sumber (informasi, pengetahuan, keterampilan, Organisasi sosial, ekonomi, kesehatan, dan lainnya). Adapun potensi (sosial, alam, dan SDM) masih sangat terbuka sekali untuk dapat didayagunakan. Secara umum intervensi kebijakan (program pembangunan)

pemerintah dan organisasi sosial telah dilakukan namun secara spesifik yang mengarah terhadap pemberdayaan keluarga belum dilakukan karena program yang telah dilakukan masih bersifat *charity*. (Sugiyanto, *pemberdayaan di wilayah perbatasan*).

Berangkat dari fenomena ketidakberdayaan tersebut, maka muncul berbagai tindakan pemberdayaan dengan berbagai pendekatan mulai dari program yang berkelanjutan sampai pada aktivitas-aktivitas yang sporadis. Pengertian pemberdayaan sendiri menjadi perhatian banyak pihak dari berbagai bidang, disiplin ilmu dan berbagai pendekatan. Menurut Rappaport dalam Suharto (1998:3); “pemberdayaan menunjuk pada usaha realokasi sumber daya melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara yang diarahkan kepada masyarakat, organisasi atau komunitas agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya”.

Menurut Sennet & Cabb, dan Conway dalam Suharto (1998:209) “ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketiadaan jaminan ekonomi, rendahnya akses politik, lemahnya akses informasi dan teknologi, ketiadaan dukungan finansial serta tidak tersedianya pendidikan dan pelatihan”.

Menurut Rappaport dalam Suharto (1998:3) “pemberdayaan menunjuk pada usaha realokasi sumber daya melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara yang diarahkan kepada masyarakat, organisasi atau komunitas agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya”.

Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subyek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang disarankan yaitu pendapatan dari pekerjaan,

pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan serta dari faktor sub sistem (Mulyanto Sumardi,1998: 34-35).

Pemerintah Provinsi Gorontalo mengelola kebijakan publik secara efektif, efisien dan ekonomis, terutama melalui intervensi fiskal daerah terhadap sektor strategis, bernilai tambah tinggi dan berpengaruh luas terhadap masyarakat. Paling tidak, ditengah minimnya peran swasta dan masyarakat. pemerintah daerah berusaha memaksimalkan peluang-peluang minimal melalui alokasi program, kegiatan dan anggaran (*aspek fiskal*) sehingga mampu menjadi daya dorong yang kuat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. (SEWINDU karya anak bangsa, 2009 : 2 ).

Dalam konteks lokal, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Gorontalo 277.244 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat), dan menurut tahapan keluarga pra sejahtera berjumlah 68.631. (Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu) Kepala Keluarga. Jumlah ini kurang lebih menyimpulkan bahwa satu dari empat penduduk Gorontalo hidup serba dalam keterbatasan. Untuk itu, pemerintah Gorontalo telah menetapkan masalah penurunan angka kemiskinan sebagai salah satu program prioritas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (BKKBN Provinsi Gorontalo, 2010 : 2)

Kabupaten Boalemo terdiri dari 7 kecamatan, 82 desa dan 358 dusun. Untuk kondisi Keluarga Keluarga (KK) di kabupaten Boalemo, berjumlah 34.704 (Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat) yang tergolong didalamnya sebagian merupakan kepala keluarga pra sejahtera berjumlah 12.921 (Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu). (BKKBN Provinsi Gorontalo, 2010 : 2)

Dibidang pembangunan Pemda Kabupaten Boalemo, secara terbuka melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom up*. Dalam kondisi daerah terbatas kemampuan keuangan pemerintah diinformasikan ke masyarakat sehingga hasil implementasi kebijakan transparansi diatas telah meningkatkan partisipasi masyarakat. (Arifin, 2011, 200:201)

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah khususnya daerah kabupaten boalemo dalam menurunkan angka kemiskinan dan telah memaksimalkan beberapa peluang program yang dilakukan oleh pemerintah didalam upaya mendorong peningkatan ekonomi, namun sampai dengan saat ini hasil pendataan keluarga yang diperoleh dari Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa perlu adanya upaya lanjut dalam penurunan angka kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan keluarga.

Melihat kondisi ini, yayasan Dana Mandiri (Damandiri) telah membawa konsep model pemberdayaan keluarga yang ditawarkan secara terpadu dan berkelanjutan melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Konsep model ini telah disosialisasikan dan telah dibentuk khususnya di daerah kabupaten Boalemo agar dapat menjadi program yang lebih efektif dan efisien. Yayasan Damandiri sendiri bertujuan untuk melaksanakan visi dan misi dalam membantu pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) terutama dalam hal meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Konsep yang dibawa oleh yayasan damandiri ini diterima positif oleh pemerintah daerah boalemo,

sehingga kedua belah pihak telah menjalin kerjasama dalam menjalankan program Posdaya tersebut.

Pada tahun 2010 posdaya telah dicanangkan dan dibentuk disetiap desa se kabupaten boalemo berjumlah 82 Posdaya. Posdaya sendiri terbentuk oleh karena adanya peran serta dari mahasiswa melalui Kuliah Kerja Sibermas (KKS) tematik Posdaya dilaksanakan oleh Universitas Negeri Gorontalo dan kerjasama dengan BKKBN Provinsi Gorontalo. Berkat kerjasama yang dilakukan oleh ketua yayasan damandiri yakni bapak Prof. Dr. Haryono Suyono, pemerintah Boalemo dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (KOPERINDAG) Kabupaten Boalemo pada awal tahun 2011 telah mengucurkan dana pinjaman bantuan modal usaha dimasing-masing kelompok posdaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dana ini diberikan untuk pengembangan usaha mikro dan dibagi secara merata melalui pengurus posdaya selanjutnya diserahkan kepada masing-masing kepala keluarga yang termasuk dalam kelompok usaha yang telah berdiri sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (sumber : Koordinator Kecamatan, PLKB).

Bantuan dana tersebut berbentuk bantuan pinjaman modal usaha dan akan dikembalikan secara angsuran sesuai hasil kesepakatan antara pengurus posdaya dengan anggota kelompok usaha. Bantuan pinjaman baru diperuntukan kepada kelompok posdaya yang bergerak dalam bidang ekonomi. Hal ini bertujuan untuk pengembangan usaha mikro bagi anggota keluarga yang kurang mampu. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masing-masing keluarga mampu meningkatkan

produktifitas dalam meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup. (PLKB, sebagai pendamping Kelompok Posdaya, 2011)

Seiring berjalannya waktu, program posdaya telah berjalan kurang lebih satu tahun, dampak yang ditimbulkan belum memperlihatkan hasil yang signifikan sesuai dengan target *MDGs (millennium development goal's)* dalam meningkatkan ekonomi keluarga yang ditandai dengan kurangnya aktifitas ekonomi di beberapa Pos itu sendiri maupun di masing-masing tempat usaha yang telah dijalankan. Hal ini diperoleh dari hasil monitoring yang Penulis lakukan dalam kegiatan monitoring dengan jajaran BKKBN Provinsi Gorontalo di beberapa posdaya yang ada di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis mengangkat judul ***“Pengaruh Pemberdayaan Berbasis Ekonomi Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo”***.

## **1.2 Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Meningkatnya kegiatan produksi masyarakat pada kelompok usaha namun belum dapat meningkatkan pendapatan mereka.
2. Kurangnya bantuan modal usaha yang diberikan dengan ditambah dengan pengembalian modal dan bunga kepada anggota kelompok usaha mikro mengakibatkan hasil yang diperoleh sangat sedikit.

3. Kurangnya evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak terkait terhadap kelompok usaha yang telah diberikan pinjaman modal usaha mikro.

### **1.3 Rumusan masalah**

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu seberapa besar Pengaruh Pemberdayaan Berbasis Ekonomi Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberdayaan berbasis ekonomi terhadap peningkatan pendapatan keluarga di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan perbandingan antara teori tentang perubahan sosial melalui pemberdayaan terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga dengan gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan Pos Pemberdayaa Keluarga di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah akan pentingnya membangun suatu daerah yang diawali dari keluarga khususnya dalam menekan angka kemiskinan menuju perubahan sosial masyarakat yang berkelanjutan dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam penyusunan program pemberdayaan kedepan serta mengambil langkah-langkah kebijakan guna melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan khususnya pada upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.